

**PENYIDIKAN PERKARA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KLATEN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II  
pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**ALI MURTOPO**  
**R100170017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENYIDIKAN PERKARA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KLATEN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ALI MURTOPO**  
**R100170017**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0007116007**

Dosen Pembimbing II



**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**  
**NIDN. 0625045901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENYIDIKAN PERKARA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KLATEN**



Oleh:

**ALI MURTOPO**  
**R100170017**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 09 Juli 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Direktur,



**Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd**  
**NIDN. 0014056201**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 5 Juli 2021

Yang menyatakan



ALI MURTOPO  
R100170017

## **PENYIDIKAN PERKARA PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KLATEN**

### **Abstrak**

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena pungutan liar termasuk dalam tindak pidana korupsi. Tekad bulat pemerintah untuk memberantas pungli semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Permasalahan muncul dalam penyidikan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten sehingga menyebabkan penyidikan tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Kabupaten Klaten menjadi terhambat. Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten, menganalisis pengaturan hukum yang diterapkan dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten dan sebagai study mengenai faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau sosiologis. Hasil penelitian dalam Kesimpulan dari hasil penelitian ini, terhambatnya proses hukum pungutan liar dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten adalah hambatan dalam proses pembuktian karena terduga mengembalikan uang pungutan liar agar tidak terjadi tindak pidana (agar terkesan pungutan liar tidak pernah terjadi), masyarakat yang enggan untuk dipanggil sebagai saksi, perbedaan persepsi antara jaksa dengan penyidik terkait dengan pasal yang harus diterapkan, dan aturan hukum yang tidak jelas mengenai unsur paksaan dalam tindak pidana pungutan liar.

**Kata Kunci:** penyidikan, pungutan liar, korupsi

### **Abstract**

Illegal fees are a form of extraordinary crime (*extra ordinary crime*) because illegal fees are included in the criminal act of corruption. The government's determination to eradicate extortion has become increasingly evident with the issuance of Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption, Law No. 28 of 1999 concerning the administration of a country that is clean and free from collusion, corruption and nepotism and Presidential Regulation No. 87 of 2016 concerning a task force to clean up illegal levies. Problems arise in the investigation of illegal levies carried out by the Klaten Resor Police, which causes the investigation of illegal levies in the Klaten Regency jurisdiction to be obstructed. The aim of the writer in this study is to find out the steps taken by the Klaten Police in investigating illegal extortion cases as a criminal act of corruption in the Klaten Police jurisdiction, analyzing the legal arrangements applied in investigating cases of extortion as a criminal act of corruption in the

area. Klaten Polres law and as a study of the factors that hinder the investigation of cases of extortion as a criminal act of corruption in the jurisdiction of the Klaten Police. The research method used in this research is empirical or sociological. The research results in the conclusion of the results of this study, the obstruction of the legal process of illegal levies in the jurisdiction of the Klaten Resor Police is an obstacle in the evidentiary process because they are suspected of returning illegal fees so that criminal acts do not occur (so that it seems that illegal levies never occur), people are reluctant to summoned as a witness, differences in perceptions between prosecutors and investigators regarding the articles that must be applied, and unclear legal rules regarding the element of coercion in the criminal act of extortion.

**Keywords:** investigation, illegal levies, corruption

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum (*recht staats*) yang mempunyai arti dimana setiap orang atau setiap warga negara harus bertindak berdasarkan hukum. Salah satu hukum yang mengatur perbuatan warga negara pada negara ini menerapkan hukum pidana dimana sifatnya memaksa setiap warga negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana lewat tindakan penghukuman. Penindakan hukuman mempunyai maksud bahwa suatu perbuatan pidana adalah tindakan yang dibatasi dengan peraturan hukum, dimana pelanggaran tersebut disertakan pengancaman (sanksi) berbentuk sesuatu pidana yang merupakan tanggung jawabnya. Menurut Hamzah, menyatakan bahwa berdasar pada azas legalitas dimana tidak ada sesuatu pun tindakan bisa dipidanakan kecuali perundang-undangan mengaturnya, sehingga untuk siapa saja pelanggar yang dilarang sudah diatur melalui perundang-undangan, sehingga untuk pelanggar larangan tersebut bisa dikenakan tindakan hukum.<sup>1</sup>

Pengertian penegakan hukum seperti yang dinyatakan Abdul Kadir Muhamad yaitu tindakan pelaksanaan penghukuman sebagaimana mestinya dengan cara pelaksanaannya diawasi supaya tak muncul pelanggaran, tetapi bila muncul pelanggaran maka harus dilakukan pemulihan hukum supaya bisa diadakan tindakan penghukuman lagi. Dari definisi tersebut disimpulkan dimana penegakan hukuman letaknya dalam aktivitas yang dilaksanakan para pejabat penegakan hukuman. Tegasnya penegakan hukum atau penindakan yang dilakukan oleh negara kepada pelaku tindak pidana pungutan liar telah bagus pelaksanaannya,

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 15

tetapi hasil akhirnya apakah suatu perbuatan administratif tersebut dapat disebut tindak pidana pungutan liar atau tidak bergantung pada putusan hakim.<sup>2</sup>

Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>3</sup> Suatu perbuatan bisa disebut menjadi tindak pidana bila unsur tindak pidana sudah terpenuhi, yakni adanya perbuatan, perbuatan tersebut dibatasi peraturan-peraturan, dan terdapat pengancaman pidana kepada pelanggar hukum tersebut.

Kata korupsi berasal dari kata Latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti korupsi dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.<sup>4</sup>

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dibatasi peraturan hukum dan terdapat tindakan pemidanaan untuk pelaku pungutan liar. Masyarakat umum kerap menyebut pungli dengan uang sogokan, salam tempel dan uang pelicin. KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai pungli, namun dalam Pasal 368 berisi tentang perbuatan yang dapat disamakan dengan pungli yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara

---

<sup>2</sup>Irene Svinarky, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)*, **Jurnal Cahaya Keadilan**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 70-78, oct. 2016. ISSN 2339-1693. Available at: <<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/935>>. Date accessed: 25 oct. 2020.

<sup>3</sup>Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, hlm. 15-16.

<sup>4</sup>Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia, hlm 211.

paling lama sembilan tahun". Hal ini mensyaratkan adanya unsur memaksa untuk dapat mengkategorikan pungli sebagai tindak pidana.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>5</sup> Sementara itu, pengertian lain pungli adalah pengadaaan bayaran/pemungutan pada area dimana semestinya tiada pengenaan tarif/pemungutan bayaran pada area ataupun dalam urusan itu. Pungli bisa berarti suatu perbuatan pemungutan bayaran atau permintaan bayaran dengan memaksa yang dilakukan oleh para pelaku ke para pihak yang lain, dimana hal tersebut adalah tindak kriminalitas atau perbuatan tindak pidana. Tekad bulat pemerintah guna memberantas pungli semakin nyata dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) sebagai upaya memberantas pungli dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan jabatan PNS/Aparatur Sipil. Pasal 2 Perpes No. 87 Tahun 2016 menegaskan bahwa Satgas Saber Pungli memiliki kewajiban untuk memberantas kegiatan pungutan liar secara efektif dan efisien secara optimal dengan memanfaatkan para personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah.<sup>6</sup> Pada pemberantasan pungli, satgas saber pungli memiliki fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016.<sup>7</sup> Salah satu kewenangan satgas saber pungli berdasarkan pasal 4 Perpres No. 87 Tahun 2016 adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.<sup>8</sup> Unit III Tipikor Reskrim Klaten pada tanggal 27 April 2017 telah menerima laporan tentang adanya pungli yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Moh Toha Solahuddin, "Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", Paraikatte, majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Volume 26 triwulan III 2016, hlm. 2.

<sup>6</sup> Pasal 2 Perpes No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

<sup>7</sup> Pasal 3 Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

<sup>8</sup> Pasal 4 Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar



pungutan uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk surat pernyataan kehilangan sertifikat tanah di Kecamatan Manisrenggo dengan tersangka Purnomo Hadi, SH. M.Si sebagai camat Manisrenggo Klaten dengan pasal yang dilanggar adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 Huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup> Setelah dilakukan penyidikan diketahui terjadinya suatu tindak pidana korupsi/penyalahgunaan wewenang oleh Purnomo Hadi, SH. M.Si yang dilakukan berulang-ulang yang terjadi pada jangka waktu tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2017 di Kantor Kecamatan Manisrenggo yang dilakukan oleh Purnomo Hadi, SH, M.Si sebagai Aparatur Sipil Negara dengan memungut biaya pengurusan tanah tanpa ada aturan atau dasar hukum yang mengaturnya dengan total pungutan sebesar kurang lebih Rp. 45.600.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Unit III Tipikor Reskrim Klaten pada tanggal 07 Februari 2018 juga menerima laporan adanya pungutan uang sebesar Rp. 68.000.000,- oleh PNS Staf UPTD Pasar Jatinom Lurah Pasar Jeblog bernama Sugiono.<sup>10</sup>

Berdasarkan data tersebut, fakta bahwa tindak pidana pungutan liar memang benar-benar terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Adanya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena tindak pidana pungutan liar adalah suatu tindak pidana, dimana masyarakat serta negara dirugikan. Bila tak tertangani secara sempurna, maka tindak pidana pungutan liar menjadi sebuah kerugian lebih besar dan lebih luas karena tindak pidana pungutan liar termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi dimana adalah merupakan kriminalitas luarbiasa (*extra ordinarycrime*). Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan abdi negara harus selalu berupaya dengan maksimal guna terwujudnya pemerintah bagus (*goodgovernance*), transparansi, dan diminimalisir kejadian tindak pidana pungutan liar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui: (1) Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Klaten dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di daerah

---

<sup>9</sup>Data Polres Klaten 2018

<sup>10</sup>Data Polres Klaten 2018

hukum Kepolisian Resor Klaten, (2) Pengaturan hukum sebagai penerapan pada penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di daerah hukum Kepolisian Resor Klaten, dan (3) Faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di daerah hukum Kepolisian Resor Klaten.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan studi empiris/sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Polres Klaten dalam Penyidikan Perkara Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Klaten**

Kepolisian Resor Klaten beralamat di Jl. Diponegoro No.27, Jetak Kidul, Karanganyar, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438 memiliki anggota kepolisian dengan jumlah 1098 polisi dengan 56 anggota resor kriminal (reskrim) dan 4 (empat) unit yang 1 (satu) unit diantaranya adalah unit tindak pidana korupsi (tipikor). Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/191.a/IV/2017/Reskrim, Kepolisian Resor Klaten memerintahkan 6 anggotanya yakni IPTU Sumardi, SH sebagai penyidik, Umar Bashori, Widodo Yudi M, Suranto, dan Antonius Adi Prabowo, SH sebagai penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 KUHP.

Pada tahun 2018 anggota Kepolisian Resor Klaten berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/55/II/2018/Reskrim memerintahkan Suardi Juaming, S.H., S.I.K., M.H dan Ali Murtopo, S.H. sebagai penyidik, Umar Bashor, suranto, Antonius Adi Prabowo, S.H. dan Agung Sajiyanto, S.Pd sebagai Penyidik Pembantu untuk melakukan penyidikan tindak pidana “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan surat perintah tersebut, anggota unit tipikor Resor Klaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi termasuk pungutan liar di wilayah Kepolisian Resor Klaten. Pungutan liar menurut Moh Toha Solahuddin, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara memungut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau dengan kata lain pungutan biaya tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan public atau Negara untuk keuntungan pribadi. Dengan adanya penyalahgunaan karena korupsi bertentangan dengan norma-norma hukum. Jika suatu tindakan secara hukum sulit disebut korupsi, tindakan ini pasti bertentangan dengan standar moral atau rasa keadilan, sehingga berkurangnya kepercayaan atau kewibawaan terhadap pemerintah Negara untuk pembangunan, rapuhnya keamanan dan ketahanan negara, kerusakan mental pribadi serta hukum tidak lagi dihormati sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan adanya kesalahan, sebab asas yang dianut mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Komisi Hukum Nasional, Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum,” Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanpa tahun, halaman 82

Wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP, Pasal 14 ayat (1g) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999. Dasar hukum Kepolisian dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 14 ayat (1g) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 25 UU No.31 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (1a) KUHAP dan Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemblokiran dan penyitaan merupakan upaya preventif dan represif dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 1 angka 1 KUHAP mendefinisikan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Yang dimaksud dengan penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 3.1.1 Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Polres Klaten dalam Penyidikan Perkara Pungutan Liar

Dalam hal penyidikan perkara tindak pidana pungutan liar, langkah-langkah yang dilakukan penyidik adalah sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan oleh polisi haruslah tidak terlepas dari system peradilan pidana, tugas dan kewenangan polisi tersebut sebagai pembagian tugas profesinya dalam penegakan hukum pidana. Dalam hal ini penegakan hukum pidana dilaksanakan dengan suatu sistem yaitu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang menunjuk pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan diatas landasan prinsip “differensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. berdasarkan kerangka landasan dimaksud, maka aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta badan-badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintah ataupun diluar pemerintah.<sup>12</sup>

Penyidikan kasus pungutan liar dilaksanakan pada tahun 2017. Pungutan liar tersebut yang dilakukan oleh Bapak Purnomo Hadi, SH, M.Si, sebagai Camat Manisrenggo Sdr. PURNOMO HADI, SH, M.Si yang menyalahgunakan wewenang yang dilakukan secara terus menerus yang terjadi dalam kurun waktu tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2017 di Kantor Kecamatan Manisrenggo, Kab. Klaten sebagai pejabat negara atau sebagai Aparatur Sipil Negara dengan memunggut atau meminta biaya pengurusan tanah tanpa ada aturan atau dasar hukum yang mengaturnya, dari hasil pemeriksaan para saksi yang pernah mengurus surat – surat tanah ke kantor Kecamatan manisrenggo antara kurun waktu tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2017 total pungutan ± Rp 45.600.000,-. Barang bukti dalam penyidikan ini adalah Uang Tunai Rp. 300.000 ( Tiga ratus ribu rupiah) dan Surat pengurusan sertifikat tanah Dalam kasus ini penyidikan telah selesai dan perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan status P-21 Nomor B-1502/O.3.19/Fd.1/08/

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 90-91

2018, pada tanggal 3 Agustus 2018 dan Tahap II B/3178/IX/RES.3.2/2018/Res. Klaten, pada tanggal 26 september 2018.

Pada tabel data perkara pungutan liar di wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten, perkara pungutan liar pernah terjadi pula tahun 2016 dengan tersangka Kepala Desa Mundu yakni Bapak Waluyo. Pada Tahun 2016 Bapak waluyo melaksanakan Program Restribusi tanah obyek Landerform dengan panitia Sdr Widodo dan dalam program tersebut diikuti oleh 50 peserta dengan biaya Rp. 2.000.000 per peserta, setelah sertifikat jadi pada tanggal 3 Juli 2016 ternyata banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran biaya dari peserta serta tidak ada pertanggungjawabannya dan dalam pungutan biaya tersebut tidak berdasarkan Peraturan Desa. Barang bukti dalam perkara ini adalah rincian penerimaan dan pengeluaran uang pelaksanaan program penyertifikatan tanah objek Landerform Desa Mundu tahun 2016 tertangga 3 Juli 2017 dan kwitansi penyerahan uang dari Panitia penyertifikatan Desa Mundu guna pelaksanaan penyerahan sertifikat di Desa Sedayu tertanggal 30 Mei 2016 di tanda tangani Sdr. JOKO TRIYONO. Penyidikan kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Waluyo ini telah selesai dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan dengan status P21 Nomor B-202/O.3.19/ Fd.1/01/2019 pada tanggal 4 Januari 2019 dan Tahap II dengan Nomor B/1054/III/RES.3.2 /2019/Res.Klt.

Tahun 2016 di Balai Desa Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten Kadus II Desa Mundu Bapak Widodo sebagai panitia Program Restribusi tanah obyek Landerform. Program tersebut diikuti oleh 50 peserta dengan biaya Rp. 2.000.000 per peserta, setelah sertifikat jadi pada tanggal 3 Juli 2016 ternyata banyak kejanggalan dalam penggunaan anggaran biaya dari peserta serta tidak ada pertanggungjawabannya dan dalam pungutan biaya tersebut tidak berdasarkan Peraturan Desa. Barang bukti dalam perkara ini adalah rincian penerimaan dan pengeluaran uang pelaksanaan program penyertifikatan tanah objek Landerform Desa Mundu tahun 2016 tertangga 3 Juli 2017, kwitansi penyerahan uang dari Panitia penyertifikatan Desa Mundu guna pelaksanaan penyerahan sertifikat di Desa Sedayu tertanggal 30 Mei 2016 di tanda tangani Sdr. Joko Triyono, Uang tunai, Surat pernyataan Sdr. Waluyo tertanggal 4 September 2017 dan Uang tunai

sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah). Penyidikan terhadap perkara pungutan ini telah selesai dengan pelimpahan berkas ke Kejaksaan yang berstatus P21 dengan nomor B-202/O.3.19/Fd.1/01/2019 pada tanggal 4 Januari 2019 dan Tahap II nomor B/1054/III/RES.3.2/2019/Res.Klt.

Tahun 2018 terjadi pula perkara pungutan liar yang dilaporkan di Kepolisian Resor Klaten, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh Sdr SUGINO, PNS Staf UPTD Pasar Jatinom Lurah Pasar Jeblog. Sdr. Sugino sebagai ASN dilaporkan melakukan pungutan uang kepada pedagang pasar Jeblog oleh lurah pasar dengan besaran Rp. 3.000.000 (tiga jutaRupiah) per pedagang yang akan mengambil kunci kios. Barang bukti dalam perkara ini adalah sisa uang penarikan uang Rp. 25.jt, sisa uang penarikan uang Rp. 2 jt, Surat ijin sewa kios pasar Jeblog Karanganom, Klaten dan Surat Keputusan Pengangkatan Sdr Sugino sebagai pengelola pasar. Penyidikan perkara pungutan liar yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Sugino ini telah selesai dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan status P21 nomor B-1234/M.3.19/Fd. 1/07/2019 pada tanggal 26 Juli 2019 dan Tahap II nomor B/3085/IX/2019/Res.Klt, Tgl 26 sep 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Idik 3 Satreskrim Klaten, Iptu Sumardi, SH sebagai Penyidik Kepolisian Resor Klaten menjabarkan langkah-langkah dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pungutan liar tersebut dalam tiga hal, yakni:

- 1) Mengkonstruksikan perkara dengan dugaan pasal yang disangkakan dengan menganalisis keterkaitan unsur-unsur dalam perbuatan terlapor dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Mencari alat bukti yang memperkuat dugaan pasal yang disangkakan melalui pemeriksaan saksi tentang bentuk paksaannya. Dalam hal penyidikan tindak pidana pungutan liar, penyidik harus mampu mencari salah satu unsur penting yang dapat menyatakan bahwa perbuatan terlapor merupakan tindak pidana pungutan liar, yakni unsur adanya paksaan. Alat bukti dalam hukum pidana berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Terkait dengan saksi dalam proses penyidikan tindak pidana pungutan liar, penyidik harus melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mengetahui / mengerti / melihat / mendengar / menyaksikan langsung aksi pungli untuk memperkuat alat bukti dan bersedia menjadi saksi; melakukan pemeriksaan terhadap saksi masyarakat (bisa korban maupun orang lain yang menyaksikannya). Setelah penyidik menghadirkan saksi-saksi dan mendengar keterangannya, maka penyidik kemudian membuat berita acara pemeriksaan saksi.

- 3) Mengkoordinasikan dengan jaksa (penuntut umum) agar dapat satu persepsi. Persamaan persepsi antara penyidik dengan jaksa ini penting mengingat bahwa setelah selesai proses penyidikan maka hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya diperiksa oleh penuntut umum sebelum persidangan di persidangan. Persamaan persepsi yang dimaksud dalam tahap penyidikan ini adalah terkait dengan Pasal-pasal apa yang dipersangkakan dan terkait dengan alat bukti yang dihadirkan dalam penyidikan perkara tindak pidana pungutan liar tersebut.

#### 3.1.2 Interaksi Kepolisian dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Proses penyidikan tindak pidana pungutan liar memerlukan interaksi dengan aparat penegak hukum lain seperti Inspektorat dan Kejaksaan. Khususnya apabila pungutan liar dilakukan oleh aparatur Sipil Negara, maka langkah yang perlu dilakukan oleh penyidik adalah berkoordinasi dengan Inspektorat dalam rangka untuk menetapkan/menghitung dugaan kerugian negara, dan juga bisa tidak koordinasi dengan Inspektorat tetapi dengan BPKP/BPK untuk menghitung kerugian negaranya. Interaksi dengan kejaksaan dibutuhkan dalam hal pelimpahan berkas dan alat-alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang suatu tindak pidana, menemukan tersangka dan menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan agar proses peradilan pidana pungutan liar lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Muslih selaku koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Klaten mengatakan bahwa penyidik dalam penyidikan tindak pidana pungutan liar perlu cermat dalam mengidentifikasi kewenangan pelaku pungli berdasarkan SOP layanan dan mengidentifikasi posisi korban.

Kecermatan penyidik dalam menentukan bahwa sebuah perkara merupakan pungutan liar atau tidak bukanlah hal yang mudah. Karena dalam hal ini penyidik perlu untuk melihat posisi, kondisi dan peran dari masing-masing pihak. Dalam perkara tindak pidana pungutan liar, terdapat kondisi dimana korban tidak dapat “menolak” untuk memberikan pungli dan bersifat pasif karena layanan yang didapat tidak sesuai SOP. Sebagai contoh dalam mengurus SIM, jika dilakukan melalui mekanisme/prosedur yang ada (tanpa peran oknum), tidak dapat lulus ujian dan tidak mendapatkan SIM bahkan waktu tunggu/proses cukup lama, tetapi jika memberikan pungli, masyarakat dapat menerima SIM tanpa harus menunggu lama, tanpa proses yang berbelit, dan dipastikan lulus ujian SIM. Dalam kondisi seperti ini, penyidik perlu mencermati dengan bijak unsur-unsur pungutan liar yang disangkakan. Sehingga koordinasi dengan ahli, jaksa, dan masyarakat merupakan langkah yang sangat penting untuk ditempuh dalam penyidikan tindak pidana pungutan liar.

### **3.2. Pengaturan Hukum yang Diterapkan dalam Penyidikan Perkara Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Klaten**

#### **3.2.1 Aturan Hukum atau Undang-Undang yang Dipakai/Diterapkan dalam Penyidikan Perkara Pungutan Liar**

Penyidikan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Klaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum atau Undang-undang yang dipakai/diterapkan dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang yang khusus mengatur tentang korupsi yakni UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan.

Penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten dilakukan oleh penyidik. Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan yang dilakukan anggota Unit Tipikor Kepolisian Resor Klaten berpedoman pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### 3.2.2 Alasan Penanganan Tindak Pidana Pungutan Liar Tidak Cukup dengan Pengaturan Menurut KUHP

Aturan hukum yang diterapkan dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten menganut asas hukum *Lex Specialis derogate Lex Generalis* yang mengandung arti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang khusus yang mengaturnya yakni UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbeda halnya apabila pungutan liar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka penyidik turut pula menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### 3.2.3 Tolok Ukur Tindak Pidana Pungutan Liar Sebagai Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi

Tolok ukur tindak pidana pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana korupsi dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang ada sebagaimana diatur didalam

ketentuan Pasal 12 huruf e, yakni: (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, (2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (3) Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya, (4) Memaksa memberikan sesuatu, memaksa membayar, memaksa menerima pembayaran dengan potongan atau memaksa untuk mengerjakan sesuatu.

### **3.3. Faktor-faktor yang Menghambat Penyidikan Perkara Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Klaten**

Pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi menerapkan hukum pidana korupsi yang memuat hukum pidana materiel dan hukum pidana formil. Hukum pidana korupsi merupakan hukum pidana khusus dengan menggunakan hukum pidana formil khusus dalam UU No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yang mengatur beberapa hal khusus dibidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta terdapat pula ketentuan khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian).<sup>13</sup> Pembuktian sangat penting dalam hukum pidana sebagai dasar penetapan benar atau tidaknya suatu tindak pidana telah dilakukan. Berdasarkan data perkara pungli Unit III Kepolisian Resor Klaten, terdapat dugaan tindak pidana pungutan liar di wilayah Kepolisian Resor Klaten yang dilaporkan setelah tahun 2018, yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Namun laporan dugaan tersebut tidak sampai pada proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses hukum pungutan liar berdasarkan laporan tahun 2019 -2020, terdapat 2 kasus dugaan tindak pidana pungutan liar yang prosesnya terhenti hanya sampai proses penyelidikan dan tidak berlanjut hingga proses penyidikan yakni dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Duwet Kec. Ngawen, Kab. Klaten berkaitan dengan program PRONA, dan penyelewengan dalam pembangunan GOR di Desa Duwet, Kec. Ngawen, Kab. Klaten yang dilaporkan pada tanggal 15 Juli 2020 berakhir karena dugaan perkara tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Klaten dan dugaan Penyetoran uang sebesar Rp 350.000,- pada ketua

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, hal. 5

RT terhadap penerima bantuan sosial tunai di Dk. Dukuh, Rt 3, Rw 4, Desa Glagahwangi, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten dihentikan karena hasil penyelidikan dari Polres dan Inspektorat tidak ditemukan adanya unsur pidana. Berdasarkan data pada tabel diatas, terdapat satu kasus dugaan pungutan liar yang dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2019 namun hingga saat penelitian ini dibuat yakni tahun 2021 kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan yakni pada kasus dugaan penyelewengan biaya study banding di BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Proses penyelidikan pada dugaan kasus pungutan liar tersebut berlangsung lama karena Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Klaten belum menemukan pembuktian yang cukup untuk menaikkan status dugaan pungutan liar tersebut ke tingkat penyidikan. Proses yang lama dan terhentinya dugaan tindak pidana pungutan liar yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Klaten adalah karena adanya faktor penghambat pembuktian perkara tindak pidana pungutan liar. Beberapa faktor yang menghambat proses penyidikan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dalam wilayah hukum kepolisian Resor Klaten muncul dari proses pembuktian.

Adapun faktor penghambat penyidikan perkara tindak pidana pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten adalah:

- (1) Terduga mengembalikan uang pungutan liar. Hal ini dilakukan oleh terduga agar tidak terjadi tindak pidana agar terkesan pungutan liar tidak pernah terjadi,
- (2) Masyarakat enggan untuk menjadi saksi dalam perkara pungutan liar,
- (3) Perbedaan persepsi antara jaksa dengan penyidik terkait dengan pasal yang harus diterapkan. Sebagai contoh adalah dalam tahap penyidikan Pasal yang digunakan oleh penyidik adalah Pasal 12A UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun penuntut umum berpendapat bahwa Pasal yang disangkakan seharusnya adalah Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbedaan persepsi ini membuat proses penyidikan memakan waktu yang lama dan tak kunjung usai,
- (4) Aturan hukum yang tidak jelas mengenai unsur paksaan dalam tindak pidana

pungutan liar sebagaimana yang jelas dirumuskan dalam Pasal 12 huruf (e) UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah 'bersifat memaksa'. Namun dalam pelaksanaannya dalam penyidikan, pembuktian unsur bersifat memaksa tersebut sulit untuk dibuktikan karena tidak ada penjelasan yang rinci mengenai bentuk paksaan dalam tindak pidana korupsi sehingga penyidik dalam hal ini harus berdasar pada Pasal 368 untuk memenuhi unsur paksaan dalam tindak pidana, bahwa paksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Sementara paksaan dalam tindak pidana korupsi tentunya berbeda dengan paksaan pada tindak pidana pemerasan pada umumnya dimana paksaan terkadang tidak hadir dalam bentuk kekerasan secara fisik. Benturan itulah yang menghambat penyidik menjadikannya sulit untuk menemukan unsur paksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pungutan liar.<sup>14</sup>

Abdul Muslih sebagai koordinator aliansi masyarakat anti korupsi Klaten berpendapat bahwa beberapa faktor yang menjadi penghambat penyidikan pungutan liar di wilayah hukum Polres Klaten diantaranya adalah: (1) Bukti permulaan yang kurang kuat, (2) Keterangan saksi khususnya saksi ahli yang kurang detail, kurangnya koordinasi antara penyidik dengan jaksa, (3) Berkas perkara tidak segera lengkap, sehingga proses penanganan kasus akan molor; rawan terjadi “kekalahan” dalam persidangan (putusan bebas) jika dipaksakan untuk “mencapai target tertentu dan, (4) Adanya faktor kepentingan.<sup>15</sup>

Hambatan dalam penyidikan perkara pungutan liar juga disebabkan karena dalam kondisi tertentu, perkara pungutan liar melibatkan banyak pihak. Masyarakat yang dipungut pun pada keadaan tertentu merasa sukarela untuk memberikan pungutan, sehingga penyidik tidak dapat memasukkan kondisi sukarela tersebut ke dalam unsur paksaan yang menjadi salah satu unsur dalam

---

<sup>14</sup>Wawancara IPTU Sumardi, SH, Kanit Idik 3 Satreskrim Klaten, tanggal 10 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB

<sup>15</sup>Wawancara Abdul Muslih, Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Klaten, pada tanggal 12 Februari 2021, pukul 10.00 WIB

pungutan liar. Terkait dengan hambatan untuk dalam unsur paksaan tersebut, langkah yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan mengkaitkannya dengan pasal gratifikasi bagi Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara sehingga menggunakan pasal berlapis yakni Pasal 12 E UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Adapun unsur tindak pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, (2) Menerima hadiah atau janji, (3) Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dan (4) Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkannya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Penyidikan perkara pungutan liar dengan menggunakan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat digunakan oleh penyidik selama terduga pungutan liar dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara. Namun apabila terduga pungutan liar bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara maka penyidik tidak dapat menggunakan pasal berlapis tersebut. Jika dalam penyidikan penyidik tidak mampu membuktikan adanya unsur paksaan dalam perkara pungutan liar karena kurangnya saksi, kurangnya alat bukti atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka penyidikan perkara pungutan liar terhambat untuk dilanjutkan ke proses berikutnya yakni pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, langkah-langkah yang Dilakukan oleh Polres Klaten dalam Penyidikan Perkara Pungutan Liar sebagai Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Klaten adalah mengkonstruksikan perkara dengan dugaan pasal yang disangkakan dengan menganalisis keterkaitan unsur-unsur dalam perbuatan terlapor dengan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, mencari alat

bukti yang memperkuat dugaan pasal yang disangkakan melalui pemeriksaan saksi tentang bentuk paksaannya dan Mengkoordinasikan dengan jaksa (penuntut umum) agar dapat satu persepsi.

*Kedua*, pengaturan hukum yang diterapkan dalam penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten yaitu Pasal 12A atau pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (e) atau pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 KUHP.

*Ketiga*, faktor-faktor yang menghambat penyidikan perkara pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Klaten adalah hambatan dalam proses pembuktian karena terduga mengembalikan uang pungutan liar agar tidak terjadi tindak pidana (agar terkesan pungutan liar tidak pernah terjadi), perbedaan persepsi antara jaksa dengan penyidik terkait dengan pasal yang harus diterapkan, dan aturan hukum yang tidak jelas mengenai unsur paksaan dalam tindak pidana pungutan liar.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, kepada pembuat undang-undang. Dalam membuat aturan hukum sebaiknya menuliskan dengan jelas mengenai bentuk paksaan dalam tindak pidana pungutan liar sehingga dalam memudahkan penegak hukum dalam pembuktian adanya tindak pidana pungutan liar dan tindak pidana pungutan liar yang termasuk sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dapat diadili dan diberantas dengan tuntas.

*Kedua*, kepada penegak hukum. Penegak hukum perlu lebih cermat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pungutan liar baik terkait dengan pengaturan hukum maupun dalam pembuktiannya. Penegak hukum juga diharapkan untuk dapat memberikan perlindungan hukum (khususnya keamanan) bagi masyarakat yang memberikan kesaksian dari ancaman pelaku tindak pidana pungutan liar. Penegak hukum khususnya penyidik perlu memiliki kapasitas, berpengalaman dan kompeten untuk menangani penyidikan tindak pidana pungutan liar. Pungutan liar merupakan tindak pidana *extra ordinary crime*, maka penegak hukum diharapkan

untuk lebih memahami serta memiliki kemampuan untuk membuat terobosan melapis pasal-pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku.

*Ketiga*, kepada masyarakat. Masyarakat harus berani memberikan kesaksian sepanjang yang diketahui, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum (khususnya keamanan) dari ancaman pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hamzah dan Anando Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulia.

Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni.

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Irene Svinarky, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)*, **Jurnal Cahaya Keadilan**, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 70-78, oct. 2016. ISSN 2339-1693. Available at: <<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/935>>. Date accessed: 25 oct. 2020.

Komisi Hukum Nasional, Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum,” Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perpes No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Solahuddin, Moh Toha. 2016. “Pungutan Liar (Pungli) dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, *Paraikatte*, Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Volume 26 triwulan III, 2016.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid. 2005. *Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidak-berdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota.